



Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap *Good Governance* dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang)

Analysis of Influence of Education Background, Community Organization and Community Participation of Good Governance with Accountability of Village Funds Allocation Management as an Intervening Variable (case study in Suruh District, Semarang Regency)

Alfian Prasetya Nugroho, * Hardiwinoto, Ida Kristiana

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Semarang

Corresponding author: Alfian15prasetya@gmail.com, * hardiwinoto@gmail.com,
idakristianagunaji@yahoo.co.id

Riwayat Artikel: Dikirim; Diterima; Diterbitkan

Abstrak

Pengelolaan alokasi dana desa mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat memediasi pengaruh latar belakang pendidikan terhadap *good governance* namun tidak dengan variabel komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Latar belakang pendidikan, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dan *good governance*.

Abstract

Village fund allocation management refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of this study indicate that educational background, organizational commitment and community participation influence the accountability of village fund allocation management, and the accountability of village fund allocation management can mediate the influence of background behind education on good governance but not with the variable organizational commitment and community participation.

Keywords: *Educational Background, Organizational Commitment, community participation, accountability for managing village fund allocations, and good governance.*

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaannya alokasi dana desa mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana setiap desa mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

a. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan bahwa



adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya.

b. Latar Belakang Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Pendidikan yakni satu sistem evaluasi untuk tiap-tiap individu untuk meraih pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang object spesifik serta khusus. Pengetahuan yang didapat secara resmi itu menyebabkan pada tiap-tiap individu yakni mempunyai pola fikir, tingkah laku serta akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.

a. Komitmen Organisasi

Ketika menjalankan pekerjaan disebuah organisasi swasta atau pemerintahan tentunya memerlukan sebuah komitmen dimana dengan adanya sebuah komitmen yang bagus dapat meningkatkan kualitas kinerja dan semangat kerja bagus. (Lincoln, 1989 dan Bashaw, 1994) dalam Sopiah, 2008:156) mengemukakan bahwa, “komitmen organisasional memiliki tiga indikator: kemauan karyawan, kesetiaan karyawan, dan kebanggaan karyawan pada organisasi”. Secara konseptual, ada tiga hal yang jadi penanda komitmen organisasional:

1. Adanya rasa percaya yang kuat dan penerimaan seseorang terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi.
2. Adanya keinginan seseorang untuk melakukan usaha secara sungguh-sungguh demi organisasi.
3. Adanya hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu organisasi (Greenberg dan Baron, 1997) .

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan wujud kepedulian masyarakat dalam menyikapi persoalan – persoalan yang ada di sekitar dan merupakan kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dalam mengawasi kinerja sebuah instansi yang berada pada masyarakat sekitar. Menurut (Adisasmita, 2006) Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (*implementasi*) program pembangunan.

c. Akuntabilitas

Pada dasarnya akuntabilitas yang dianut dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan akuntabilitas Publik, menurut Mardiasmo dalam buku (Rakhmat, 2018) akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

d. Good Governance

Alokasi dana desa yang di berikan pemerintah kepada setiap desa dengan tujuan untuk mengembangkan setiap desa yang mendapat gelontoran dana. Dalam pengelolaanya alokasi dana desa harus bersifat akuntabel dan transparansi sehingga bisa mewujudkan system pemerintahan yang baik sehingga terwujudlah *good governance*.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000 pengertian *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi



hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

e. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kepada desa, yang mana dana tersebut sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan karakteristik kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan dan pejabat desa yang ikut serta mengelola pengalokasian dana desa. sehingga sempel pada penelitian ini berjumlah 85 orang. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dari beberapa variabel terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governace*. Sesuai dengan hasil uji-t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat memediasi variabel latar belakang pendidikan dalam mewujudkan *good governance* namun tidak dapat memediasi variabel komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *good governance*. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*:

Ukuran kertas A4, dengan ukuran huruf 12 poin. Marjin: normal. Panjang artikel secara keseluruhan adalah 4 – 7 halaman. Bagian pendahuluan ditulis dalam bahasa Indonesia, spasi tunggal. Jenis huruf Times New Roman, berisi latar belakang dan tujuan penelitian serta ulasan pendekatan dan atau teori yang digunakan.

Uji Regresi 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.490	1.750		1.423	.159
	Latar belakang pendidikan	.337	.084	.410	3.999	.000
	Komitmen organisasi	.258	.090	.262	2.873	.005
	Partisipasi masyarakat	.206	.087	.243	2.384	.020

a. Dependent Variable: Akuntabilitas



Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS 25

Uji Regresi 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.047	2.540		1.199	.234
	Latar belakang pendidikan	.151	.133	.117	1.131	.262
	Komitmen organisasi	.232	.136	.150	1.706	.092
	Partisipasi masyarakat	.325	.129	.243	2.526	.014
	Akuntabilitas	.694	.169	.442	4.113	.000

a. Dependent Variable: Good governance

Dari tabel uji di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh latar belakang pendidikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Variabel latar belakang pendidikan mempunyai nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ maka dapat membuktikan bahwa variabel latar belakang pendidikan berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sassa (2017), Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki.

2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Variabel komitmen organisasi mempunyai nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,05$ karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ maka dapat membuktikan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina (2016), komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Variabel partisipasi masyarakat mempunyai nilai signifikan sebesar $0,020 < 0,05$ karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ maka dapat membuktikan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noerma (2017), bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa di tunjukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbentuk aspirasi dalam peranan materi atau uang, tenaga dan juga menikmati hasil pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

4. Pengaruh latar belakang pendidikan terhadap *good governance*.



Variabel latar belakang pendidikan mempunyai nilai signifikan sebesar $0,262 > 0,05$ karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ maka dapat di simpulkan bahwa bahwa variabel latar belakang pendidikan aparatur desa tidak berpengaruh terhadap *good governance*. Latar belakang pendidikan setiap aparatur desa tidak dapat mempengaruhi *good governance* hal ini dikarenakan kecerdasan setiap individu tidak dapat dinilai dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, kecerdasan seseorang dapat di miliki dari pengalaman, pelatihan, dan eadaan lingkungan di mana seseorang bekerja.

5. Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap *good governance*.

Variabel komitmen organisasi pemerintah desa mempunyai nilai signifikan sebesar $0,092 > 0,05$ karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ maka dapat di simpulkan bahwa bahwa variabel latar belakang pendidikan aparatur desa tidak berpengaruh terhadap *good governance*. Variabel komitmen organisasi tidak sepenuhnya dapat mempengaruhi *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) hal ini di karenan setiap aparatur desa hanya menaati peraturan dan mempertanggung jawabkan pekerjaannya hanya sebatas formalitas untuk memenuhi tanggung jawab pada pemerintah pusat (Rustiarini, 2016).

6. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap *good governance*.

Variabel partisipasi masyarakat mempunyai nilai signifikan sebesar $0,014 < 0,05$ karena nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ maka dapat di simpulkan bahwa bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif berpengaruh terhadap *good governance*. Masyarakat merupakan elemen terpenting di dalam pemerintahan, dengan adanya partisipasi masyarakat yang baik maka kinerja pemerintah akan semakin baik dan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) akan terwujud.

7. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam memediasi hubungan antara latar belakang pendidikan, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *good governance*.

Variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat memediasi variabel latar belakang pendidikan dalam mewujudkan *good governance* dengan nilai signifikansi sebesar $0,284$ lebih besar dari nilai signifikansi secara langsung sebesar $0,151$. Variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tidak dapat memediasi variabel komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap *good governance* dikarenakan nilai signifikansi secara langsung lebih besar dari signifikansi nilai secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian Rustiarini (2016), mengatakan bahwa dalam pelaksanaan mekanismenya pembuatan laporan pertanggung jawaban masih sebatas formalitas untuk memenuhi pertanggung jawaban terhadap pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, terdapat tiga variabel yang diterima dari hasil pengujian yang dilakukan, variabel tersebut adalah latar belakang pendidikan, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. Kedua, berdasarkan pengujian yang di lakukan variabel latar belakang pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap *good governance*. Sedangkan variabel komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap *good governance* karena setiap aparatur desa hanya menjalankan pekerjaan sesuai peraturan dan pertanggung jawaban masih sebatas formalitas untuk memenuhi pertanggung jawaban pada pemerintah pusat. Ketiga, berdasarkan pengujian yang di lakukan variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat memediasi latar belakang pendidikan dalam mewujudkan *good governance*. Namun variabel akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tidak dapat mediasi variabel komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, (2006), *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Allen, N. J., and Meyer, J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization. *Journal of Occupational Psychology*, 1-18.
- Anthony dan Govindarajan. 2005, *management control system*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat.
- Bahtiar, Noerma Alifahrani. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 5, Nomor 3.
- Benvaniste, G.1991. *Birokrasi*.Jakarta: Rajawali.
- Baron & Greenberg. 1997. *Behavior in Organization Understanding and Managing The Human Side of Work*. 6th edition. USA: Prentice Hall.
- Donaldson. Lex, Davis James H, 1991, "Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Return" *Australian Journal of Management*. Vol.16 iss. 1.
- Edison, Emron., Yohny Anwar., dan Imas Komariyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Karyanto R Rudi.2016. Apakah Penyaluran Dana Desa Terhambat oleh Karakteristik Kepala Desa. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol,16,No.2.
- Lane, Jan-Erik. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: Sage Pablication.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Murin, Sasha dan Rahmawaty. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, No. 3.
- Muhibbin Syah.2010.*Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutakin, Zaenal. 2014. Pengaruh penerapan prinsip – prinsip good governance terhadap aktifitas kinerja pegawai di sector pendidikan tahun 2013 di unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten lampung selatan. *Skripsi*, Universitas Lampung.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 106–115.
- Nurastuti, Margaretha. 2018. Analisis penerapan prinsip partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Studi kasus pada desa tokelan kecamatan Panji kabupaten Situbondo. *Skrpsi*, Univesitas Jember.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta. 2003. h. 3
- Perdana, Khaeril Wahyu. 2014. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa,



- Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Jogjakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Republik Indonesia. UUD No,32 TA 2004 tentang otonomi pemerintah daerah.
- Republik Indonesia. peraturan pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang desa, alokasi dan desa.
- Republik Indonesia. peraturan Mentri Keuangan No.225/PMK.o7/2017. Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.
- Rulyanti, Dina. 2016. Pagaruh regulasi, komitmen organisasi, komunikasi dan sumberdaya manusia terhadap kinerja pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel intervening (studi pada pemerintahan desa di kabupaten bondowoso). *Tesis*, Universitas Jember.
- Republik Indonesia. UU No 6 Tahun 2014. Tentang desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. Nomer 20 Tahun 2003 tentang system dan pendidikan nasional.
- Republik Indonesia. Peraturan pemerintah no.80 tahun 2016 tentang susunan organisasi pemerintah desa
- Republik Indonesia. Peraturan pemerintah No.101 tahun 2.000 tentang *good governance*.
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: CV. Andi ovset
- Soekidjo Notoatmodjo. (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. (2001). *Sumberdaya manusia dan produktivitas kerja*. Jakarta: mandar maju.
- Sopiah. (2008). *Prilaku Organisasional*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2007. *Sumberdaya manusia dan produktivitas kerja*, Bandung: Penerbit Bandar Maju
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Samudra, Azhari A, 2005, *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi*, Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Wahida, 2015. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keungan daerah kabupaten konawe utara. *Skripsi*. Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas hasanudduin.